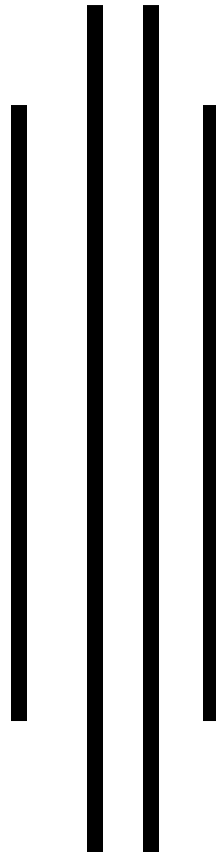


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
JL. RAYA KALIGONDANG KM 2,4 PURBALINGGA
TAHUN 2019**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga Tahun 2019. LKjIP Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran yang telah berjalan dan perjanjian kinerja untuk tahun yang akan berjalan. Proses kinerja Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis Tahun 2015- 2021 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2019 untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah , khususnya Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang. Terimakasih.

Purbalingga, Februari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA



YANI SUTRISNO UN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 198603 1 028

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJIP	4
D. Gambaran Umum Dinas Perhubungan.....	4
E. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan	6
BAB II. PERENCANAAN KERJA	10
A. Rencana Strategis	10
Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program	10
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN.....	14
A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan	14
A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis.....	14
B. Akuntabilitas Keuangan.....	21
B.1. Pengelolaan Pendapatan Dinas Perhubungan.....	23
B.2. Permasalahan dan Solusi dalam Perolehan PAD tahun 2019	23
BAB IV. PENUTUP	
A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan	27
B. Permasalahan Yang dihadapi	27

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas Daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut

“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pembangunan bidang Perhubungan ditetapkan dalam misi Pemerintah Kabupaten yaitu pada misi ke-6 sebagai berikut *“Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonom, social dan budaya melalui gerakan masyarakat yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana wilayah yang memadai”*:

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu : "Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat 2 (dua) prioritas sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019, yaitu :

1. Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran;
2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas

Guna mencapai tujuan dan prioritas sasaran tersebut pada tahun 2019, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 2 (Dua) program utama dengan 20 (Dua Puluh) kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 24.371.551.000 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Ribu Rupiah), terdiri dari :

- 1) **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp 4.364.629.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.100.963.349,- terdapat selisih sebesar Rp. 263.665.651,- terdiri dari Gaji pegawai sebesar Rp. 136.812.322,- Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp. 93.531.125,- dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 33.322.204,-
- 2) **Belanja Langsung** sebesar Rp. 20.006.922.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.959.797.162,- atau sebesar 94.77%, terdapat selisih dan atau efisiensi sebesar Rp. 1.047.124.838,-

Untuk tingkat capaian **sasaran-1** : yaitu terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran, menunjukkan bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan menunjukkan skala **baik**, hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja yang dapat dicapai yaitu sebesar **90,34%**.

Untuk tingkat capaian **sasaran-2** adalah sebesar 94.77%, jika dibandingkan capaian pada tahun 2018 hanya sebesar 69.08% terjadi kenaikan sebesar 25.69%, atau dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran-2 pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup baik dan masuk dalam kategori **“baik”**

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, jumlah sarana dan prasarana perhubungan terjadi kenaikan sebesar 94.77% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2018. Perlu diketahui bahwa pemasangan fasilitas perlengkapan jalan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kepadatan lalu lintas, hal ini didasarkan pada Survey Lali Lintas Harian Rata-rata (LHR) yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Secara Umum pada tahun 2019 Dinas Perhubungan dapat melaksanakan 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 94,37% atau masuk kategori **“baik”**

Tingkat capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran Dinas Perhubungan masuk dalam kategori **“baik”** yaitu rata-rata 94,37%, namun secara keseluruhan tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan sampai dengan tahun 2018 atau tahun ke-3 dari target RENSTRA baru terpenuhi 68.29%, atau masih belum terpenuhi dari target yang ditetapkan, 53%, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Sering hilang atau terjadi pencurian terhadap rambu yang telah dipasang;
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, khususnya untuk PPNS LLAJ, staf teknis administrasi maupun teknis dibidang perhubungan yang menguasai tehnik APILL, LPJU dan tehnik bangunan (konstruksi)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

1. Sosialisasi kepada masyarakat melalui pembentukan kampung.Lalu Lintas dan sekolah-sekolah;
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai melalui usulan untuk mengikuti diklat baik teknis administrasi maupun teknis bidang perhubungan khususnya PPNS LLAJ dan Tehnis APILL.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten./Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang lebih realistis, mendorong pemerintah untuk meninjau kembali sistem pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang lebih *accountable*, hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Hal tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dengan demikian jelas bahwa rakyat mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* yang menitikberatkan pada asas-asas demokrasi, transparansi dan partisipasi dalam setiap pelaksanaannya. Aspek-aspek ini merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Oleh karena itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sistem ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik secara transparan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2019.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2019 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 Dinas Perhubungan adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan anggaran dalam rentang waktu satu tahun anggaran 2019.

D. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Kedudukan Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dalam pasal 4 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 89 tahun 2016 disebutkan tugas Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

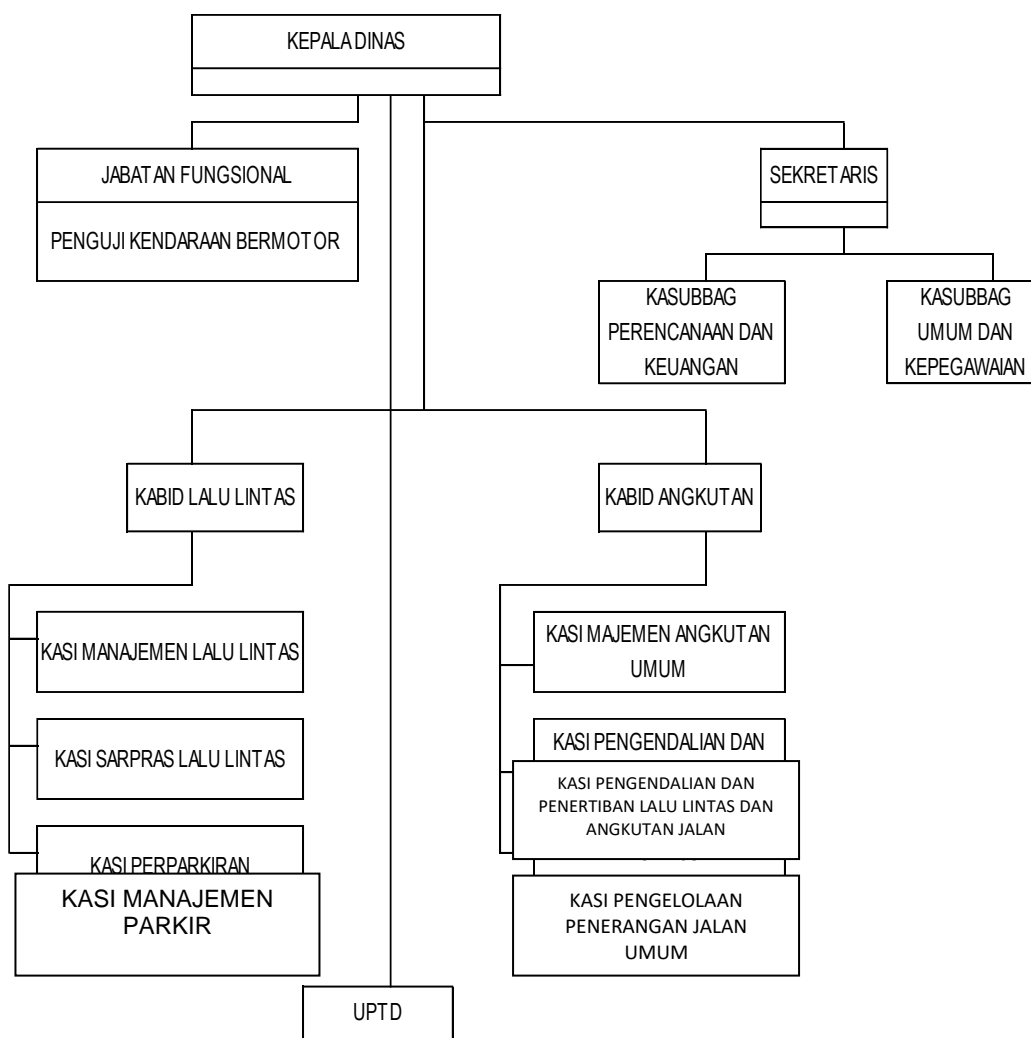
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

E. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Subbagian. Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Lalu Lintas
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 - 3) Seksi Manajemen Parkir
- d. Kepala Bidang Angkutan
 - 1) Seksi Manajemen Angkutan Umum
 - 2) Seksi Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3) Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Gambar 1
Struktur Organisasi DINAS PERHUBUNGAN



e. Kondisi Kepegawaian

Dinas Perhubungan sebagai dinas teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai dedikasi dan inovasi yang tinggi, serta memiliki kemampuan tehnis di bidang Perhubungan, jumlah pegawai Dinas Perhubungan sampai dengan Desember 2019 terinci sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai** : 86 (Delapan Puluh Enam) orang
- Pegawai Negara Sipil : 40 (empat puluh) orang
- PTT SK. Bupati : 12 (dua belas) orang
- PTT SK. Kepala Dinas : 34 (tiga puluh empat) orang
- b. PNS Berdasarkan Pendidikan**
- S2 : 1 (satu) orang
- S1 : 17 (tujuh belas) orang
- Diploma III : 2 (dua) orang
- Diploma II : 3 (tiga) orang
- SLTA : 14 (empat belas) orang
- SLTP : 2 (satu) orang

SD : 1 (satu) orang
 Jumlah : 40 (empat puluh) orang

c. PNS Berdasarkan Golongan

Golongan IV : 4 (empat) orang
 Golongan III : 19 (sembilan belas) orang
 Golongan II : 16 (enam belas) orang
 Golongan I : 1 (satu) orang
Jumlah : 40 (empat puluh) orang

d. PNS Berdasarkan Jenis kelamin

Laki-laki : 35 (tiga puluh lima) orang
 Perempuan : 5 (lima) orang
 Jumlah : 40 (empat puluh) orang

e. Pembagian Personil

NO.	BIDANG/UNIT	PNS/CPNS	NON PNS (PTT)
1	Kepala Dinas	1	
1	SEKRETARIAT	11	13
2	BIDANG ANGKUTAN		
	a. INDUK (KANTOR)	5	5
	b. PENGUJIAN KEND. BERMOTOR	5	4
	c. TERMINAL BUKATEJA*)	2	4
	d. TERMINAL KEJOBONG*)	1	2
	TERMINAL JOMPO	0	2
	TERMINAL PENARUBAN	0	1
	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	8	12
3	BIDANG LALU LINTAS	7	3
	JUMLAH	40	46

Lebih lengkap mengenai kondisi kepegawaian Dinas Perhubungan diuraikan dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sebagaimana terlampir.

f. Sarana dan Prasarana :

- a. Prasarana Gedung pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
- 1) Gedung Kantor Dinas
 - 2) Gedung Terminal Bukateja
 - 3) Gedung Terminal Kejobong
 - 4) Gedung Sub Terminal Pendaruban

- 5) Gedung Sub Terminal Jompo
- 6) Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- 7) Gedung Gudang LPJU

b. Sarana Operasional

- 1) Kendaraan Roda empat : 9 (sembilan) unit
- 2) Kendaraan Roda dua : 24 (dua puluh empat) unit
- 3) Sarana Komputer / Printer : 42 (empat puluh dua) unit
- 4) Laptop : 16 (enam belas) unit
- 5) Pesawat Telepon : 3 (tiga) unit
- 6) Pesawat HT : 51 (lima puluh satu) unit
- 7) Repeater : 1 (satu) paket
- 8) Peralatan PKB : 1 (satu) paket
- 9) Peralatan Perbengkelan : 1 (satu) paket
- 10) Truk Sandelift LPJU : 1 unit
- 11) Truk Skylift : 1 unit

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinhub terdiri dari KIB A – E senilai Rp.98.279.160.563,- (sembilan puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)

g. Kondisi Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya pembangunan sarana perhubungan dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah. Melalui penguatan konektivitas antar wilayah dan di dalam wilayah itu sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa khususnya ke wilayah-wilayah yang berada jauh dari lokus produksi barang yang nantinya akan menguntungkan para pelaku usaha (produsen) dan masyarakat (konsumen). Adapun fasilitas Dinas Perhubungan yang mendukung kegiatan ekonomi, yaitu :

1) Fasilitas Angkutan :

- a. Panjang jalan di wilayah Kabupaten Purbalingga mencapai 888.084 Km yang terdiri dari jalan beraspal sepanjang 888.710 Km, kerikil sepanjang 42 Km dan jalan tanah sepanjang 52 Km.
- b. Kendaraan niaga yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 846 kendaraan, terdiri dari 42 unit kendaraan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), 101 kendaraan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), 203 unit angkutan Kota, 457 unit angkutan perdesaan, 13 unit angkutan Pariwisata dan 30 unit angkutan Taxi.
- c. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi di kabupaten purbalingga terdapat 1 terminal type A berada di Bobotsari yang pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan, 1 terminal type B berada Purbalingga yang pengelolaannya oleh Pemerintah Propinsi serta 3 terminal

type C yaitu Terminal Bukateja, Kejobong, Kutasari dan 2 (dua) sub terminal, yaitu sub terminal Penaruban dan sub terminal Jompo.

2) **Fasilitas Lalu Lintas :**

NO	FASILITAS Perlengkapan Jalan	JUMLAH	
		JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
1.	Marka Jalan	78,6 km	410,872km
2.	Rambu-rambu	515 bh	867 bh
3.	RPPJ	71 bh	116 bh
4.	Guard Raill	1052 m	3364 m
5.	Traffic Light	15 unit	13 unit
6.	Warning Light	22 unit	40 unit
7.	Traffic cone	0 buah	100 buah
8.	Halte	11 buah	7 buah
9.	Paku marka	460 buah	659 buah
10.	Deliniator	105 bh	146 bh
11	Safety Mirror	10 bh	26 bh
12	Lampu PJU	91 buah	8.689 buah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perhubungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021 .

A.1. Visi

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah. Dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :**“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**

A.2. M I S I :

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 6 : *” Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai”*

tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 6 : *” Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai”*

A.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-6 terkait dengan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut “ Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dengan indikator kinerja persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

A.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh dinas Perhubungan adalah Terwujudnya sarana dan prasarana Perhubungan yang bermanfaatbuntuk keselamatan

berlalu lintas, dengan indicator kinerja persentase sarana dan prasarana Perhubungan yang memadai

A.5. Kebijakan

Arah dari kebijakan urusan Perhubungan ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, arah kebijakan tersebut yaitu :

- 1) Peningkatan pemenuhan sarana prasaranan utama dan penunjang angkutan jalan;
- 2) Mendukung pengadaan transportasi massal (BRT), reaktifasi jalur kereta api, pembukaan akses transportasi udara.

A.6. Prioritas Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam Program – program kegiatan yang terdiri 3 (tiga) Program sebagai berikut :

1. Program penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;
2. Program Peningkatan manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas
3. Program Peningkatan pelayanan Angkutan

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
- b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
- e. Pendidikan dan pelatihan pegawai
- f. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- a. Pengelolaan Kebersihan Terminal
- b. Operasi Tehnis Laik Jalan
- c. Pengadaan Bahan Pengecatan PKB
- d. Pemeliharaan Terminal Tipe C
- e. Revitalisasi Peralatan PKB
- f. Penyusunan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Pembinaan dan Monitoring Angkutan
- h. Fasilitas Pembangunan Bandara
- i. Mudik Lebaran Gratis
- j. Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- k. Fasilitas Pemilihan Pelajar Pelopor dan Sopir Teladan

3. Program Peningkatan manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas

- a. Pengadaan Perlengkapan Jalan
- b. Pengadaan dan Pemasangan LPJU
- c. Pemeliharaan LPJU

- d. Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- e. Pembinaan Petugas Parkir
- f. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Lain
- g. Fasilitasi Forum LLAJ
- h. Fasilitasi Penilaian Wahana Tata Nugraha
- i. Fasilitasi Tim Andalalin
- j. Pengadaan dan Pemasangan LPJU (Ban-Gub)

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Mendasarkan pada RENSTRA tahun 2016 - 2021 dan setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perhubungan selaku pengguna anggaran dengan Bupati Purbalingga selaku Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan selanjutnya ditanda tangani bersama. Isi Perjanjian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan			
	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan konektivitas antar wilayah	Angka kecelakaan	Kasus	420
	Sasaran			
	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	Presentase pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas	Persen	70
		Persentase pemenuhan keselamatan angkutan jalan	Persen	92

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp. 2.322.569.000	
2.	Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp. 11.550.693.000	
3.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 1.960.220.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis

Hingga akhir tahun 2019 Dinas Perhubungan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu "Meningkatnya keselamatan Lalu Lintas dan konektivitas antar wilayah" dengan indikator tujuan yaitu : angka kecelakaan.

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan indikator dari tujuan yaitu : angka kecelakaan, dapat diketahui selama 2 (dua) tahun angka kecelakaan, hal ini dapat diketahui dari data yang diperoleh dari Satlantas Polres Purbalingga yaitu :

Table III.1
Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO	TAHUN	LAKA YG TERJ ADI	JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG TERLIBAT							LAIN- LAIN
			MOBIL PENUMPANG		MOBIL BEBAN		MOBIL BUS		SPM	
			UMU M	TDK UMU M	UMU M	TDK UMU M	UMU M	TDK UMU M		
1.	2018	498	3	66	0	73	12	0	728	17
2.	2019	579	4	72	0	58	9	0	807	28
PROSENTASE		16,3	33,3	9,1	0	20,5	25	0	10,85	64,7

(sumber : data Satlantas Polres Purbalingga)

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas jumlah kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sejumlah 579 kejadian kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan sebesar 16,3% dibandingkan jumlah kecelakaan tahun 2018 sejumlah 498, adapun jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Mobil penumpang tidak umum sejumlah 66 kendaraan (11,4%) dari jumlah kecelakaan yang terjadi sebesar 579
2. Mobil penumpang umum dan mobil bus atau kendaraan bermotor wajib uji (**KBWU**) sejumlah 13 kendaraan (2,25%) dari jumlah kecelakaan yang terjadi sebesar 579.
3. Mobil beban tidak umum sejumlah 58 kendaraan (10%) dari jumlah kecelakaan yang terjadi sebesar 579.
4. Sepeda Motor sejumlah 807 kendaraan (139,3%) dari jumlah kecelakaan yang terjadi sebesar 579.

Adapun penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian manusia (human error) bukan dikarenakan oleh faktor kendaraan, faktor geometris jalan, dan perlengkapan jalan

Tabel III.2
Data Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	RINCIAN	
			RODA 2	RODA 4
1.	2017	35.600	32.411	3.189
2.	2018	30.000	26.649	3.351
3.	2019	31.709	27.694	4.015

(sumber : data Satlantas Polres Purbalingga)

Secara angka pelanggaran lalu lintas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan pelanggaran sebesar 16% jika dibandingkan dengan tingkat pelanggaran lalu lintas pada tahun 2017 Pada tahun 2019 terjadi kenaikan pelanggaran sebesar 5.7% hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pengguna jalan pada peraturan lalu

lintas menurun, yaitu kurangnya ketaatan terhadap perlengkapan standarisasi kendaraan bermotor, SIM dan rambu-rambu lalu lintas.

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan angkutan penumpang dan angkutan barang, Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan operasi laik jalan, yaitu operasi pemeriksaan administrasi berupa Buku Uji Kendaraan, Kartu Pengawasan dan Trayek.

**Table III.3.
Presentase Pemenuhan Keselamatan Angkutan Jalan Tahun 2019**

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	KBWU Yang Melaksanakan Uji	%
10.822 Kendaraan	10.239 Kendaraan	94,6

. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2019 terdapat sejumlah 10.822 kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) sedangkan kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji sejumlah 10.239 kendaraan (94,6%) sedangkan kendaraan yang tidak melaksanakan uji sejumlah 583 kendaraan.

Penyebab kendaraan tidak melaksanakan uji :

1. Kendaraan dalam kondisi rusak / dalam perbaikan
2. Kendaraan berada di luar kota dan belum melaksanakan uji berkala

**Table III.4.
Data Operasi Laik Jalan Tahun 2017, 2018 dan tahun 2019**

No.	Tahun	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kendaraan Yang Diperiksa	Jumlah Kendaraan Yang Disidang
1.	2017	19 Kegiatan	670 Kendaraan	60 Kendaraan
2.	2018	13 Kegiatan	1302 Kendaraan	46 Kendaraan
3.	2019	12 Kegiatan	1.277 Kendaraan	151 Kendaraan

(sumber : data Dinhub Kab. Purbalingga)

Dari table diatas diketahui bahwa untuk tahun 2019 terjadi kenaikan pelanggaran laik jalan sebesar 69% jika dibandingkan tahun 2018.

Selain untuk mewujudkan tujuan Dinas, terdapat (dua) sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut

1. Sasaran terwujudnya kelancaran adminitrasi perkantoran:

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA KELANCARAN ADMINITRASI PERKANTORAN

Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran tersebut tersaji dalam matrik dibawah ini, yaitu :

Tabel III.5. :
Sasaran terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% (R/T)x100%
1. Kelancaran Administrasi perkantoran	Terlaksananya rapat koordinasi	506	606 kegiatan	119.76
	Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD	100%	100%	100
	persentase pelaksanaan kegiatan SKPD tepat waktu	100 %	100%	100
	persentase realisasi anggaran SKPD	100 %	96,90%	96,90%
	Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor	86 pegawai dan masyarakat purbalingga	86 pegawai dan masyarakat purbalingga	100
	Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor	7 gedung, 6 kend. Dinas roda empat, 18 kend.dinas roda dua, komputer dan alat komunikasi (HT, Repeater)	9 gedung, 9 kend. Dinas roda empat, 24 kend.dinas roda dua, komputer dan alat komunikasi (HT, Repeater)	100
	Terlaksananya diklat/bimtek	15 pegawai	52 pegawai	346.67
	Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan pub lik	100 %	85%	85
Rata rata capaian kinerja sasaran 1				131.04%

secara umum capaian kinerja pada sasaran **Kelancaran Adminstrasi Perkantoran sebesar 131.04%**. masuk dalam kategori "amat baik", dan hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang hanya tercapai 91,6%

Sasaran tersebut dapat dicapai lebih dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada indikator persentase realisasi anggaran SKPD tercapai sebesar 96.90%.

Sasaran ini tercapai melalui Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut Penyediaan

a)Bahan dan Jasa perkantoran

- b) Rapat – Rapat koordinasi dan konsultasi
- c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- d) Pengadaan Sarana dan prasarana kantor
- e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- f) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD
- g) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

2. Sasaran Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Bermanfaat Untuk Keselamatan Berlalu Lintas

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN 2 : TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN YANG BERMANFAAT UNTUK KESELAMATAN BERLALU LINTAS

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas mendapatkan nilai rata-rata 69,08% dengan kategori “*cukup*”, dengan rincian pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel III 6 :
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Bermanfaat Untuk Keselamatan Berlalu Lintas

Indikator Kinerja Satuan	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2019)
Presentase pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas.	246%	70	69.08	98.69%	68,29

Tabel III.7 :
Rata-rata Capaian Sarana Prasarana Perhubungan Tahun 2019

NO	SARPRAS PERHUBUNGAN YANG MEMADAI	KONDISI IDEAL (2016-2021)	TARGET 2019	REALISASI 2019	PERSENTASE
1	- Marka Jalan	15.000	3.000	3.391	113.03
2	- Rambu Standar	1.000	284	50	17.60
3	- RPPJ	44	8	3	37.5
4	- Safety Mirror	25	5	-	0
5	- Guard Raill	2.000	300	180	60
6	- Traffic Light	14.	3	3	100
7	- Warning Light	18	3	7	233.33
8	- Road Barrier	140	30	-	0
9	- Traffic Cone	350	60	-	0
10	- Paku Marka	1.400	200	100	50
11	- Halte	35	7	-	0
12	- LPJU	3600	683	1275	186.67
13	- Terminal	10	1	1	100
RATA – RATA					69.08

Tabel III.8 :

Capaian Sarana Prasarana Perhubungan Th. 2018 dan 2019:

INDIKATOR KINERJA	SARPRAS PERHUBUNGAN	2018			2019		
		YANG SEHARUSNYA	YANG TEREALISASI	%	YANG SEHARUSNYA	YANG TEREALISASI	%
Persentase Sarana dan prasarana Perhubungan yang memadai	- Marka Jalan	2000	6635	33	3.000	3.391	113.0
	- Rambu-rambu	75	44	1,	284	50	3
	- RPPJ	5	13	75	8	3	17.60
	- Safety Mirror	0		58	5	-	37.5
	- Guard Rail	200	200	,6	300	180	0
	- Traffic Light	2	2	26	3	3	60
	- Warning Light	2	5	0	3	7	100
	- Road Barrier	20		0	30	-	233.3
	- Paku Marka	50	100	10	200	100	3
	- Traffic cone	200	559	0	60	-	0
	- Halte	6	10	10	7	-	50
	- LPJU	550	724	0	683	1275	0
	- Terminal	-	2	25	1	1	0
				0			186.67
				0			100
				20			
				0			
			27				
			9,				
			5				
			16				
			6,				
			6				
			13				
			2				
			20				
			0				
	rata-rata			159.9			69.08

Perolehan capaian kinerja tertinggi pada indikator kinerja pembuatan warning light, yaitu 233.33%, hal ini dikarenakan tahun 2019 prioritas pengadaan fasilitas perlengkapan jalan pada pembuatan warning light.

Jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk seluruh jalan di Kabupaten Purbalingga maka capaian yang telah diperoleh adalah sebagai berikut bahwa kondisi sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2019 sudah terpenuhi sebanyak 68.29% dari keseluruhan yang dibutuhkan, hal ini dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

Tabel III.9 :

Capaian Kinerja Sarana Prasarana Perhubungan Secara Keseluruhan sampai dengan tahun 2019

NO	SARPRAS PERHUBUNGAN	KONDISI IDEAL (2016-2021)	REALISASI SAMPAI DENGAN 2019 (2016,2017,2018,2019)	PERSENTASE
1	- Marka Jalan	15.000	13.021	86.81
2	- Rambu Standar	1.000	294	29.4
3	- RPPJ	44	28	63.63
4	- Safety Mirror	25	6	24
5	- Guard Rail	2.000m	960	48
6	- Traffic Light	14	7	50
7	- Warning Light	18	20	111.11
8	- Road Barrier	140	45	32.14
9	- Traffic Cone	330	884	267.88
10	- Paku Marka	1.400	300	21.43
11	- Halte	35	16	45.71
12	- LPJU	3.600	2.796	77.67
13	- Terminal	10	3	30
	Rata-rata			68.29

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, jumlah sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Purbalingga terjadi kenaikan sebesar 17,6% jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya tahun 2018. Perlu diketahui bahwa pemasangan fasilitas perlengkapan jalan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kepadatan lalu lintas, hal ini didasarkan pada hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR).

Dengan sarana prasarana perhubungan yang memadai, pelayanan perhubungan akan semakin baik dan diharapkan tingkat kecelakaan lalu lintas bisa ditekan atau semakin sedikit dan pada saatnya bisa mencapai *zero accident*.

Sasaran 2 ini tercapai didukung melalui 2 (dua) Program, yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan
 - b. Pengadaan dan Pemasangan LPJU
 - c. Pemeliharaan LPJU
 - d. Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan
 - e. Perencanaan dan pengaturan lalu lintas
 - f. Penataan dan pengelolaan parkir
2. Program Peningkatan Manajemen Angkutan, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Terminal
 - b. Pengelolaan PKB
 - c. Perencanaan dan pembinaan angkutan
 - d. Pembangunan dan rehabilitasi terminal
 - e. Pembangunan ruang tunggu PKB
 - f. Penertiban dan pengendalian lalu lintas angkutan

Tingkat capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran Dinas Perhubungan masuk dalam kategori "amat *baik*" yaitu rata-rata 100.06%, namun secara keseluruhan tingkat capaian pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan sampai dengan tahun 2019 atau tahun ke-4 dari target RENSTRA baru terpenuhi 68.29%, atau masih belum terpenuhi dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Sering hilang atau terjadi pencurian terhadap rambu yang telah dipasang;
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, khususnya untuk PPNS LLAJ, staf teknis administrasi maupun teknis dibidang perhubungan yang menguasai teknik APILL, LPJU dan teknik bangunan (konstruksi)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

1. Sosialisasi kepada masyarakat melalui pembentukan kampung.Lalu Lintas dan sekolah-sekolah.
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai melalui usulan untuk mengikuti diklat baik teknis administrasi maupun teknis bidang perhubungan khususnya PPNS LLAJ dan Tehnis APILL.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

**Tabel III.10 :
Realisasi Anggaran**

PROGRAM		KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2		3	4	5	6
Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	633.310.000	590.369.388	93.21
	2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	160.000.000	159.884.834	99.92
	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	626.281.000	616.334.225	98.41
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	757.528.000	734.148.071	96.91
	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	45.000.000	44.993.054	99.98
	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000	14.997.000	99.98
	7	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	85.450.000	84.880.000	99.33
Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	Pengelolaan Terminal	170.000.000	169.000.000	99.41
	2	Pengelolaan PKB	292.920.000	292.419.100	99.82
	3	Perencanaan dan pembinaan angkutan	435.250.000	433.456.471	99.58
	4	Pembangunan dan rehabilitasi terminal	640.400.000	507.030.000	79.17
	5	Pembangunan ruang tunggu PKB	270.650.000	268.539.000	99.22
	6	Penertiban dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan	151.000.000	122.720.266	81.27
Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas	1	Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan	1.725.500.000	1.688.690.650	97.86
	2	Pengadaan dan Pemasangan LPJU	7.225.000.000	7.207.166.300	99.75
	3	Pemeliharaan LPJU	1.595.583.000	1.411.286.808	88.44
	4	Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan	207.000.000	203.120.000	98.11
	5	Perencanaan dan pengaturan lalu lintas	524.920.000	524.201.684	99.86
	6	Penataan dan pengelolaan parker	326.130.000	320.704.500	98.33

**Tabel III.11:
Analisis Efisiensi per Sasaran Tahun 2019**

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	% ANGGARAN	% CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	2.322.569.000	2.104.806.000	90.62	131.04	
Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang bermanfaat untuk Keselamatan Berlalu Lintas	13.564.353.000	13.148.334.779	96.93	69,08	Secara anggaran terdapat Efisiensi, hal ini diperoleh dari nilai Kontrak/lelang. Tetapi dari nilai capaian kinerja dapat dikatakan blm memenuhi target, hal ini dikarenakan anggaran pengadaan sarpras perhubungan hanya cukup utk pengadaan sebagaimana tsb diatas. Dan kegiatan yang lain bersifat mendukung pelaksanaan tupoksi dinas perhubungan
Jumlah	15.886.922.000	15.253.140.779	96.90	100.06	

B.1. Pengelolaan Pendapatan Dinas Perhubungan Target dan Realisasi Pendapatan

**Tabel III.12 :
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2019**

	JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
1.	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum.	2.000.000.000	2.006.142.000	100.31
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	700.000.000	671.374.059	95.91
3.	Retribusi Terminal :			
	a. Terminal Bukateja.	80.280.000	74.058.500	92.25
	b. Terminal Kejobong.	28.800.000	26.676.000	92.63
	c. Terminal Jompo	14.400.000	16.144.000	112.11
	d. Terminal Penaruban	5.544.000	6.684.000	120.56
4.	Retribusi Ijin Trayek.	118.018.000	151.079.000	128.01
	Jumlah	2.947.042.000	2.949.660.559	100.09

Lebih rinci mengenai realisasi PAD 2019 dapat dilihat pada lampiran.

Dari target PAD yang ditetapkan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp **2.947.042.000,-** dapat terealisasi sebesar Rp. **2.949.660.559,-** atau tercapai **100.09%**. Dengan kata lain perolehan PAD tersebut tercapai lebih dari target yang di tetapkan yaitu sebesar 0.09%, sedangkan target PAD yang tidak tercapai perolehannya yaitu retribusi terminal Bukateja dan Kejobong dan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

B.2. Permasalahan dan solusi dalam Perolehan PAD tahun 2019 :

1) Permasalahan

- a) Banyak kendaraan angkutan umum yang tidak beroperasi karena dianggap sudah tidak menguntungkan sehingga beralih pemanfaatannya untuk pribadi (plat hitam);.
- b) Dari 20 Angkutan perdesaan jurusan Banjarnegara – Kejobong yang masuk Terminal Kejobong hanya 2 angkutan dan hanya beroperasi pada hari pasaran saja sehingga tidak ada penarikan retribusi.
- c) Dari 33 angkutan perdesaan jurusan Bukateja – Kejobong yang beroperasi hanya 12 angkutan.
- d) Mikro bis jurusan Penaruban – Kejobong dari 17 unit kendaraan, yang beroperasi hanya 4 unit, hal ini dikarenakan sepi penumpang (banyak yang beralih moda transportasi)
- e) Terdapat beberapa jalur trayek yang kendaraannya tidak beroperasi maksimal sehingga tidak memperpanjang ijin seperti :

1. Jalur H jurusan Kutasari-Walik-Kr Klesem-Purbayasa-Padamara dan 9 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 3 unit, tidak aktif 2, 4 unit dihentikan.
 2. Jalur J jurusan Bukateja – Kembangan –Tidu – Kemangkon - Panican-Kr.Kemiri – Senon – Palumutan – Bokol - Kedungbenda dari 17 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 6 unit, tidak aktif 4, 7 unit dihentikan.
 3. Jalur P Bobotasari – Selaganggeng – Serayu – Pratin - Kutabawa dari 18 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 5 unit, tidak aktif 11, 2 unit dihentikan.
 4. Jalur Q Bobotsari-Selaganggeng – Mrebet – Pagerandong - Pengalusan-Binangun – Cipaku - Karangangka dari 20 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 4 unit, tidak aktif 15, 1 unit dihentikan
 5. Jalur V Pagutan – Metenggeng – Tobong – Kutasari – Karangreja -Kr.Klesem – Dawuhan – Bojanegara – Babakan - Kalikabong (pasar hewan), dari 22 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 2 unit, tidak aktif 11, 9 unit dihentikan
 6. Jalur X Kebogohan - Ps.Bojongsari dari 4 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 1 unit, tidak aktif 2, 1 unit dihentikan
 7. Jalur Y Terminal penaruban-sempor lor-brecek-kaligondang-cilapar-selanegara-selakambang-sidareja-pagerandong-sidanegara-arenan-slinga dari 5 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 2 unit, tidak aktif 3 unit.
- f) PAD dari pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2019 tercapai 95.73%, hal ini dikarenakan ada sebagian kendaraan yang tidak melaksanakan Uji KIR.
- g) PAD dari pelayanan di Terminal tercapai 93.83% hal ini dikarenakan :
1. Kendaraan yang beroperasi di terminal Kejobong yang seharusnya dalam 1 (satu) tahun ada sejumlah 54.750 kendaraan yang operasional realisasinya kendaraan yang beroperasi hanya 14.658 kendaraan (26,80% kendaraan yang beroperasi)
 2. Kendaraan yang beroperasi di terminal Bukateja yang seharusnya dalam 1 (satu) tahun ada sejumlah 62.415 kendaraan yang operasional realisasinya kendaraan yang beroperasi hanya 32.934 kendaraan (53% kendaraan yang beroperasi)

2) SOLUSI :

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas Dinas Perhubungan, mencoba mengatasinya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilakukan pembinaan terhadap seluruh staf (staf meeting) setiap sebulan sekali guna meningkatkan loyalitas dan kinerja.
- b. Memberi masukan kepada pengambil kebijakan hendaknya dalam menetapkan target PAD dengan melihat potensi yang ada/senyatanya melalui kegiatan kajian/survey potensi PAD
- c. Dilaksanakannya operasi tehnik laik jalan setiap bulan sekali, hal ini dimaksudkan disamping untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban para pengguna angkutan baik angkutan penumpang maupun barang juga dimaksudkan menjaring angkutan yang sudah tidak laik jalan supaya melakukan uji kir kendaraan agar kendaraan tersebut menjadi laik jalan dan yang telah habis masa

ijin trayek supaya memperpanjang ijin trayek, sehingga dengan kegiatan ini bisa didapat banyak manfaat. yaitu menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan Uji Kir kendaraan bermotor dan Perpanjangan Ijin Trayek angkutan baik angkutan penumpang maupun barang.

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Pada hakekatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk menyajikan kinerja suatu Instansi Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang telah berjalan yaitu T.A. 2019 guna mengetahui tingkat capaian kinerja, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian apabila ditemukan ketidakberhasilan dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya, sehingga di waktu yang akan datang akan lebih baik lagi.

1. Tingkat keberhasilan Dinas Perhubungan Tahun 2019 :

- 1.1. Dari target PAD yang ditetapkan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. **2.947.042.000,-** dapat terealisasi sebesar Rp. **2.949.660.559,-** atau tercapai **100.09%**. Dengan kata lain perolehan PAD tersebut tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0.09%.
- 1.2. Capaian Kinerja, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga menunjuk pada skala “ **amat baik**” yaitu **rata-rata 100.06%**, yaitu dengan penyerapan anggaran sebesar 96.90%.

B. Permasalahan Yang dihadapi

Secara prinsip dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 Dinas Perhubungan tidak mengalami permasalahan yang menonjol, hanya saja dalam pelaksanaan tugas sehari – hari yaitu pada kegiatan pemeliharaan LPJU sangat terhambat dalam melaksanakan pemeliharaan hal ini dikarenakan sarana truk sandelift yang ada kondisinya sudah sering rusak karena factor usia, bahkan pada tahun 2019, perlu diketahui bahwa kendaraan operasional pemeliharaan LPJU hanya terdapat 2 unit truk dengan tenaga tehnik sebanyak 10 orang, sehingga sangat kekurangan untuk melakukan pemeliharaan LPJU se-Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2019 Dinas Perhubungan akan tetap mengupayakan agar lebih baik dengan meningkatkan kualitas manajemen kegiatan dan administrasi sehingga tidak akan ditemui lagi kendala-kendala yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 semoga dapat bermanfaat, terima kasih

Purbalingga, Februari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Purbalingga Transportation Office. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA" around the perimeter and "DINAS PERHUBUNGAN" in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "YANI SUTRISNO UN, S.Sos" is printed in bold, followed by the title "Pembina Utama Muda" and the NIP number "196510051986031028".

YANI SUTRISNO UN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196510051986031028